

ABSTRACT

Fiscal Exemption for Foreign Affairs that came into effect from 1 January 2009 is a facility granted to any taxpayer who has a Taxpayer Identification Number. Overseas Fiscal actually came into force in 1980 to minimize the Indonesian people who travel abroad to spend foreign exchange. With this release, any taxpayer who will carry out foreign travel does not need to pay.

State is enforcing these rules in order to increase the Taxpayer Compliance, both obey the register to obtain Tax File, reported SPT, and pay taxes owed. Expect the existence of the State Fiscal Foreign Acquisition, any taxpayer who has had NPWP can calculate and report the SPT correctly, and pay taxes, so an increase in state income from taxation.

The author uses descriptive analytical method survey approach. The definition is descriptive analytical method to collect data in accordance with the actual situation, present and analyze it so as to provide information in decision making. In this study researchers used survey data via questionnaires.

Through this research can be seen that there is influence of Foreign Affairs Fiscal Liberation of Taxpayer Compliance. The amount of influence of State Fiscal Liberation Against the Taxpayer Compliance is for 0542, which has a strong correlation keeraratan.

Keywords: Fiscal Exemption for Foreign Affairs and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pembebasan Fiskal Luar Negeri yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2009 merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Fiskal Luar Negeri sebenarnya mulai diberlakukan pada tahun 1980 untuk meminimalkan orang-orang Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri untuk menghabiskan devisa negara. Dengan adanya pembebasan ini, setiap Wajib Pajak yang akan melaksanakan perjalanan luar negeri tidak perlu membayar

Negara memberlakukan peraturan ini ialah dalam rangka untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, baik patuh dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, melaporkan SPT, dan membayar pajak terutang. Negara mengharapkan dengan adanya Pembebasan Fiskal Luar Negeri, setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dapat menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, serta membayar pajak terutang, agar terjadi peningkatan pendapatan negara dari bidang perpajakan.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Pengertian deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data survey melalui kuesioner.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh Pembebasan Fiskal Luar Negeri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh Pembebasan Fiskal Luar Negeri Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0.542, yaitu memiliki keerabatan korelasi yang kuat.

Kata kunci: Pembebasan Fiskal Luar Negeri dan Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	7
2.1. Kajian Pustaka.....	7
2.1.1. Pajak.....	7

2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	7
2.1.1.2. Unsur dan Ciri-Ciri Pajak.....	9
2.1.1.3. Fungsi Pajak.....	10
2.1.1.4. Pungutan Lain Selain Pajak.....	11
2.1.1.5. Pendekatan Pajak.....	12
2.1.1.6. Pembagian Hukum Pajak.....	15
2.1.1.7 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
2.1.1.8. Jenis Pajak.....	18
2.1.1.9. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
2.1.1.10. Timbulnya Hutang Pajak.....	24
2.1.1.11. Berakhirnya Hutang Pajak.....	25
2.1.1.12. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	26
2.1.2. Pajak Penghasilan.....	28
2.1.2.1. Definisi.....	28
2.1.2.2. Subjek Pajak.....	28
2.1.2.3. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.....	29
2.1.2.4. Objek Pajak Penghasilan.....	30
2.1.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	31
2.1.3. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri.....	32
2.1.3.1. Pihak Yang Membayar Pajak.....	32
2.1.3.2. Besarnya PPh Pasal 25 (Fiskal Luar Negeri) Bagi Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri.....	32
2.1.3.3. Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditanny.....	33

2.1.3.4. Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Melalui Pembebasan Langsung dan Pembebasan Dengan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri.....	34
2.1.3.5. Pengecualian dari Pembayaran Fiskal Luar Negeri Dengan Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.....	38
2.2. Rerangka Pemikiran.....	39
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1. Objek Penelitian.....	43
3.2. Sejarah KPP Bojonagara.....	43
3.3. Jenis Penelitian.....	45
3.4. Definisi Operasional variabel.....	46
3.5. Populasi dan Sampel.....	48
3.5.1. Populasi.....	48
3.5.2. Sampel.....	48
3.6. Pengumpulan Data.....	49
3.6.1. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.2. Teknik Pengolahan Data.....	50
3.7. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. Hasil Penelitian.....	57

4.1.1. Cara Pemerintah Melakukan Pembebasan Fiskal Luar Negeri.....	57
4.1.1.1. Pembebasan Secara Langsung.....	58
4.1.1.1.1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan Fiskal Luar Negeri Secara Langsung.....	59
4.1.1.2. Pembebasan Dengan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri.....	62
4.1.1.2.1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan Fiskal Luar Negeri Dengan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri.....	63
4.1.1.3. Pembebasan Fiskal Luar Negeri Dengan Menggunakan NPWP...	66
4.1.1.3.1. Tujuan Pembebasan Fiskal Luar Negeri.....	69
4.1.1.4. Tata Cara Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Yang Akan Melakukan Perjalanan Luar Negeri.....	70
4.1.2. Pengaruh Pembebasan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
4.1.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	73
4.1.2.1.1. Uji Validitas.....	73
4.1.2.1.2. Uji Reliabilitas.....	79
4.1.2.2. Pengujian Regresi Sederhana.....	82
4.1.2.3. Pengujian Korelasi.....	84

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	89
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel X.....	47
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Y.....	47
Tabel 3.3. Pemberian Kode/Kategori untuk Jawaban Pertanyaan Positif Tertutup..	51
Tabel 4.1. Jumlah Penerimaan Fiskal Luar Negeri KPP Bojonegara.....	69
Tabel 4.2. Hasil Tabulasi Kuesioner.....	71
Tabel 4.3. KMO and Bartlett's Test.....	74
Tabel 4.4. Anti-image Matrices.....	75
Tabel 4.5. Rotated Component Matrix ^a	77
Tabel 4.6. Rotated Component Matrix ^a	78
Tabel 4.7. Case Processing Summary.....	79
Tabel 4.8. Reliability Statistics.....	79
Tabel 4.9. Item-Total Statistics.....	80
Tabel 4.10. Case Processing Summary.....	80
Tabel 4.11. Reliability Statistics.....	80
Tabel 4.12. Item-Total Statistics.....	81
Tabel 4.13. Descriptive Statistics.....	82
Tabel 4.14. Correlations.....	82
Tabel 4.15. Variables Entered/Removed ^b	83
Tabel 4.16. Model Summary ^b	83
Tabel 4.17. ANOVA ^b	83
Tabel 4.18. Coefficients ^a	83
Tabel 4.19. Correlations.....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Rerangka Pemikiran.....	42
Gambar II Tata Cara Pembebasan Fiskal Luar Negeri.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Kuesioner.....	89